

ISBN : 978-602-19161-0-0



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL HARI LINGKUNGAN HIDUP 2011**

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**



KERJASAMA:

**PPLH - LPPM UNSOED
DENGAN**

IKATAN AHLI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA



**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2011**



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL

KEARIFAN LOKAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DAN REGULASI: STUDI KASUS TRADISI SASI DI MALUKU <i>Bhimo Rizky Samudro dan Dinarjati Eka Puspitasari</i>	2
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ERA OTONOMI DAERAH <i>Atik Krustiyati</i>	8
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN SUKA MARGASATWA KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT DI PROVINSI SUMATERA UTARA <i>Fitriana Saragih, Boedi Hendarto, dan Hartuti Purnaweni</i>	14
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI MATA AIR SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL DI PEGUNUNGAN BATURAGUNG, LEDOK WONOSARI DAN PERBUKITAN KARST GUNUNG SEWU, KABUPATEN GUNUNGGIDUL <i>Sudarmadji, M. Widyastuti, dan Rika Harini</i>	21
STRATEGI PEMBERDAYAAN PENGELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN KEBUMEN <i>Suharno</i>	30
POLA PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR TUK BABON DAN TUK PAKIS OLEH MASYARAKAT LOKAL DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU <i>Akhmadi, Boedi Hendarto, dan Winardi Dwi Nugraha</i>	36
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI (STUDI KASUS : PEMANFAATAN SUMBER AIR PANAS ALAM CAGAR ALAM GUCI KABUPATEN TEGAL) <i>Dian Nur Amalia, Hartuti Purnaweni, dan Sri Suryoko</i>	44
PERANAN EMPANG PARIT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HUTAN MANGROVE (STUDI KASUS : DI KELURAHAN KUTAWARU, KECAMATAN CILACAP TENGAH, KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH) <i>Sumarhani</i>	50
UPACARA ADAT BERTANI SAWAH PADA MASYARAKAT SUNDA DAN PERANANNYA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN LINGKUNGAN <i>Johan Iskandar, Asep Zainal Mutaqin, dan Heny Pujihartini</i>	57
PERSEPSI DAN PERILAKU PETANI TERHADAP ADOPSI SISTEM PERTANIAN PADJ ORGANIK <i>Triyuyun, Indah Susilowati, dan Kismartini</i>	64
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN CAGAR ALAM PANJALU KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT <i>Rudi Suradi, Hartuti Purnaweni, dan Niken Rahayu</i>	70
✓ MEMADUKAN INOVASI DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM <i>Slamet Rosyadi</i>	77 ✓



Memadukan Inovasi Dan Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam²

Slamet Rosyadi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
slametrosyadi@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal telah terbukti efektif dalam menjaga sustainabilitas lingkungan. Mekanisme kepatuhan melalui pemberlakuan nilai dan norma sosial dan budaya yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam menjadi *entry point* bekerjanya instrumen kearifan lokal. Namun demikian, kearifan lokal tidak dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan jika tidak diparalelkan dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang adaptif dengan kapasitas masyarakat lokal. Makalah ini mencoba untuk mendeskripsikan pentingnya upaya untuk memadukan inovasi dan kearifan lokal sebagai basis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengalaman riset penulis dan telaah literatur menjadi material penting dalam menganalisis hubungan inovasi dan kearifan lokal. Sebagai penutup, makalah ini mengidentifikasi rumusan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan basis inovasi dan kearifan lokal.

Kata kunci: inovasi, kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat, sustainabilitas lingkungan.

PROLOG

Pendekatan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional *top-down* telah diakui tidak mampu mengatasi persoalan *overexploitation* dan degradasi lingkungan (Adhikari et al., 2007). Selain tidak didukung dengan kapasitas birokrasi yang memadai, pendekatan *top-down* cenderung mengabaikan kearifan dan keunikan lokal. Padahal masyarakat lokal dan lingkungannya telah membangun hubungan yang unik dan terlembaga dalam sistem sosial budaya setempat.

Namun demikian, pengelolaan sumber daya alam yang hanya mengandalkan kearifan lokal juga tidak memadai. Menurut Rositah (2005), kemampuan *indigenous knowledge* yang dimiliki masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak cukup tangguh menghadapi berbagai intervensi pihak luar. Studi yang dilakukan oleh Gebremedhin, Pender, dan Tesfay (2002) menemukan bahwa pengelolaan sumber daya alam secara komunal semakin melemah di wilayah yang akses terhadap pasar semakin berkembang. Dengan kata lain, ada hubungan yang negatif antara bertahannya kearifan lokal dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal pada wilayah tertentu sangat rentan terhadap pengaruh pasar.

Rentannya kearifan lokal terhadap tekanan ekonomi juga dilaporkan oleh Rosyadi (2010) bahwa mitos, situs budaya, dan norma sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan tidak lagi relevan ketika berhadapan dengan krisis ekonomi dan politik. Masyarakat lokal yang semakin terintegrasi dengan pasar dan sumber-sumber daya ekonomi cenderung memiliki persepsi yang lebih eksploitatif daripada masyarakat lokal yang tradisional. Tekanan ekonomi yang cenderung meningkat ditemukan menjadi faktor ancaman terbesar terhadap keberlangsungan kearifan lokal.

INOVASI DAN KEARIFAN LOKAL

Pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam telah dikaji oleh beberapa peneliti. Meinzin-Dick et al (2002) melaporkan bahwa introduksi teknologi baru untuk meningkatkan produksi rumput ternak mendorong para petani untuk mengelola lingkungannya menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan para petani merasakan manfaat teknologi bagi keberlangsungan ketersediaan pakan



ternak. Situasi ini juga telah mendorong peningkatan kekuatan kolektif (*collective action*) dari para petani. Studi lainnya oleh Rosyadi (2010) menemukan bahwa pemanfaatan sumber daya sungai sebagai prasarana pembangkit listrik yang dihasilkan oleh pengenalan teknologi mikrohidro telah menguatkan pentingnya upaya pelestarian hutan. Untuk menguatkan upaya pelestarian hutan, tokoh-tokoh masyarakat setempat menggali kembali berbagai nilai budaya dan mitos yang berwawasan konservasi. Meskipun belum teruji keefektifannya, kasus tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal sebenarnya pernah ada tetapi kemudian mengalami pemudaran akibat pendekatan sumber daya alam yang sentralistik.

Menurut Bank Dunia (1998), dengan mempelajari kearifan lokal akan diperoleh pemahaman terhadap pengetahuan lokal dan konteks yang produktif dalam mendukung berbagai program pembangunan. Salah satu kisah sukses dari pemanfaatan kearifan lokal adalah bisnis sektor bambu yang dikembangkan oleh Pemerintah China di Provinsi Zhejiang Distrik Anji. Berbagai produk mulai dari rumah bambu, kerajinan tangan, makanan, hingga pasta gigi dikembangkan dari bambu yang dikembangkan oleh masyarakat daerah Anji di China. Perlu diketahui bahwa budi daya bambu telah menjadi tradisi lama di wilayah Anji dan menjadi basis ekonomi masyarakatnya. Dari pengembangan bambu saja ekonomi daerah Anji mengalami kemajuan yang signifikan. Hasilnya, pendapatan tahunan rumah tangga masyarakat Anji telah mencapai kisaran antara US\$2,500 hingga US\$10,000 (sekitar Rp. 22,5 juta hingga Rp 90 juta per tahun, dengan asumsi US \$1 setara dengan Rp 9.000,-). Kisah sukses ini menjadi bukti penting perlunya integrasi antara kearifan lokal dan inovasi. Dengan adanya integrasi tersebut, berbagai potensi lokal dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

ISU-ISU PEMBERDAYAAN

Dalam konteks sumber daya alam khususnya yang diatur pemanfatannya menurut regulasi formal, ada beberapa isu penting yang perlu diatur sejak awal:

- (1) Hak kepemilikan (*property rights*). Studi yang dilakukan oleh Susangkawati (2011) melaporkan bahwa inovasi sumber daya hutan negara menjadi kawasan ekowisata telah mengabaikan kearifan lokal. Masuknya investor yang akan mengubah layanan hutan dari konservasi menjadi wisata alam merupakan inovasi untuk meningkatkan nilai sumber daya hutan. Namun demikian, inovasi tersebut ditentang oleh masyarakat dan lembaga kehutanan lokal karena sejak awal masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengembangan ekowisata. Padahal keterlibatan masyarakat dengan lingkungan alamnya sudah dibina sejak lama dan telah terlembaga dalam tatanan kontrak bersama Perhutani. Ironisnya, Perhutani dengan dasar hukum SK No. 400/Kpts/Dir/ 2007 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Perhutani yang mengatur pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya hutan merasa tidak perlu untuk melibatkan masyarakat desa hutan dan lembaganya dalam pengelolaan ekowisata. Persoalan tidak jelasnya hak kepemilikan telah lama menjadi perhatian Bank Dunia (1998) yang menyoroti lemahnya posisi dan hak masyarakat dan kearifan lokalnya *vis a vis* kekuatan negara dan pemodal.
- (2) Adaptasi inovasi dengan kearifan lokal. Inovasi teknologi baik yang berwujud *hardware* ataupun *software* perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masyarakat lokal. Studi yang dilakukan Raj (2010) menemukan bahwa inovasi berbasis riset dan pengembangan yang dilakukan oleh birokrasi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya, inovasi teknologi yang diperkenalkan seperti varietas baru justru menyebabkan punahnya varietas lokal dan bahkan telah menimbulkan penyakit-penyakit dan hama tanaman yang sebelumnya tidak dikenal.
- (3) Konflik kelembagaan. Studi yang dilakukan Rosyadi dkk (2009) melaporkan bahwa pilihan kelembagaan yang mengatur pola pemanfaatan sumber daya alam seringkali menimbulkan konflik. Kasus Kawasan Segara Anakan (KSA) yang sebenarnya dapat diatur dengan peraturan pemerintah pusat yang memberikan ruang dan keuntungan untuk masyarakat lokal, namun pemerintah lokal justru membuat aturan sendiri yang cenderung memarginalkan masyarakat lokal. Hal ini tidak lepas dari kapasitas birokrasi lokal maupun masyarakat lokal itu sendiri yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai terutama untuk merumuskan aturan yang menguntungkan semua pihak.



KERANGKA STRATEGI PEMBERDAYAAN

Untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan inovasi diperlukan kerangka strategi pemberdayaan yang tepat. Beberapa strategi pemberdayaan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan status hak kepemilikan masyarakat dengan peraturan pemerintah daerah. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat lokal khususnya yang berada dalam otoritas birokrasi tertentu akan bermasalah jika hanya diatur dengan aturan lokal. Seringkali dalam praktiknya, aturan-aturan yang datang dari pemerintahan di level yang lebih tinggi dapat meminggirkan aturan yang levelnya lebih rendah. Dukungan terhadap pandangan ini dapat dilihat dari kasus keberhasilan masyarakat lokal di Jambi dalam menghentikan penebangan liar yang dapat merusak sumberdaya hutan yang menjadi milik mereka, sebagai berikut: "Beberapa masyarakat desa telah mengusir penebang liar ketika masyarakat yakin bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk melakukannya karena lahan hutan dianggap sebagai resmi milik mereka. Penjaga lokal dari hutan adat di Desa Baru Pangkalan, di perbatasan Taman Nasional Kerinci (Jambi), yang diakui berdasarkan SK Bupati pada tahun 1993, telah berhasil mencegah penebangan liar mengangkut kayu yang mereka tebang, sehingga menurunkan tingkat penebangan liar" (lihat Bennet, 2003).
- (2) Memosisikan masyarakat lokal sebagai mitra strategis dalam proses formulasi inovasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa riset dan pengembangan untuk inovasi teknologi yang diperuntukkan masyarakat lokal tidak didahului dengan analisis kebutuhan dan kearifan masyarakat lokal. Hal ini mencuatkan isu pentingnya pelibatan masyarakat dan aktor-aktor penting yang mewakili masyarakat dalam proses riset dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah teknologi atau pendekatan yang cocok dan dukungan sosial yang luas.
- (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dan birokrasi lokal melalui lokakarya yang membahas tata kelola kelembagaan pengelolaan sumber daya alam. Seringkali pilihan-pilihan kelembagaan yang diambil tidak didahului dengan proses dialogis. Melalui lokakarya yang melibatkan pemangku kepentingan yang *concern* terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam akan diperoleh berbagai alternatif yang berpotensi maksimal dan menguntungkan semua pihak.

EPILOG

Pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara berkelanjutan jika didukung dengan pendekatan sosial yang *concern* terhadap kearifan lokal (*local wisdom*). Pengetahuan masyarakat membawa muatan informasi penting tentang berbagai hal terkait dengan situasi dan kondisi sumber daya alam atau lingkungan. Namun demikian, untuk meningkatkan bobot nilai kearifan lokal diperlukan rasionalisasi dengan inovasi ilmu pengetahuan yang adaptif. Hal ini menuntut strategi pemberdayaan masyarakat yang menguatkan hak-hak kepemilikan masyarakat, memosisikan masyarakat lokal sebagai mitra strategis, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan birokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, B., F. Williams, and J.C. Lovett, (2007): Local Benefits from Community Forests in The Middle Hills of Nepal. *Forest Policy and Economics* 9: 464-476.
- Bennett, C.P.A., (2003): Tanggung Jawab, Tanggung Gugat (Akuntabilitas) dan Persatuan Nasional dalam Tata Pemerintahan Desa. Dalam: Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gebremedhin, B., J. Pender, and Tesfay, G., (2002): Collective Action for Grazing Land Management in Crop-Livestock Mixed Systems in the Highlands of northern Ethiopia. Working Paper No. 42. ILRI Nairobi, Kenya.
- Meinzin-Dick, R., Knox, A. Place, F., and Swallow, (2002): Innovation in Natural Resource Management, B. The John Hopkins University Press.



- Raj. S., (2010): Traditional Knowledge. Innovation Systems and Democracy for Sustainable Agriculture: A Case Study on Adi Tribes of Eastern Himalayas of North-East India. The Proceeding of ISDA, France.
- Rositah, Erna, (2005): Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya: Studi Kasus di Kabupaten Malinau. *Governance Brief* No. 14, CIFOR, Bogor.
- Rosyadi, S, (2010): Management of Local Forestry Resources in Overcoming Poverty and Environmental Issues. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (Terakreditasi DIKTI) Vol. 23 No. 3 Juli-September, hal. 213-220.
-, (2009): Reinventing Development Management in Conservation Area through Strengthening Local Institution: A Case Study of Segara Anakan Lagoon, Cilacap. The Proceeding of International Seminar on Reinventing Public Administration Based on Local Culture", Fisip Unsoed, November, Purwokerto.
- Susangkawati, R.D., (2011): *Good Governance* dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Tingkat Lokal: Studi Kasus di LMDH Madyo Laras Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Skripsi Fisip Unsoed.
- World Bank, (1998): Indigenous Knowledge for Development: A Framework for Action. *Report Paper*, Knowledge and Learning Centerc Africa Region World Bank.